



ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Elizar Sinambela¹, Kiki Rizki Ana Pohan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

elizarsinambela@umsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan data dalam menganalisis laporan realisasi anggaran adalah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan, anggaran belanja dan realisasi belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varian (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun 2010 sampai 2013 dikatakan baik dan pertumbuhan pendapatan dikatakan cukup baik. Pada tahun 2010 sampai 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rasio kemandirian keuangan dikatakan cukup baik. Dalam merealisasikan pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2013 cukup efektif dan efisien serta dalam penilaian kinerja dikatakan baik. Belanja rutin dan belanja pembangunan pada tahun 2010 sampai 2013 dikatakan cukup baik, Belanja langsung dan belanja tidak langsung dikatakan cukup baik. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.

Kata Kunci : Kinerja, Pendapatan dan Belanja.

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawabkan publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas (value for money) untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk sesuatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 209).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengukuran kinerja Sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, Pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan

pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004: 121).

Penilaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**”.

KAJIAN PUSTAKA

Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember”.

Adapun struktur APBD berdasarkan permendagri nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah.

2) Belanja Daerah

Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/depleksi asset/terjadinya utang yang mengalokasikan berkurangnya ekuitas dana. Menurut Halim (2002 : 54) definisi atau pengertian Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimasukkan untuk menutupi deficit anggaran/sebagai alokasi surplus anggaran adanya pos pembiayaan merupakan upaya APBD makin inovatif.

1. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006: 274), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam 2 (dua) bagian (Mahmudi, 2007) yaitu :

1) Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik (Halim : 2004). Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara :

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal ini menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan (Abdul Halim : 2004). Adapun rumus dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Abdul Halim, 231). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim 2002 : 126).

Sedangkan analisis rasio keuangan adalah suatu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga (Samryn, 324). Adapun rasio keuangan APBD adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2004 : 232).

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Abdul Halim: 234). Untuk menghitung rasio efisiensi pendapatan asli daerah memiliki rumus dari rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah ini adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2004 : 235). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pajak daerahnya tersebut efisien atau tidak. Adapun rumus rasio efisien ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2) Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mardiasmo: 2004). Kinerja anggaran belanja daerah di nilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga di analisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Mardiasmo : 2004).

1. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

a. Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Adapun rumus dari analisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap belanja adalah :

$$\text{Belanja Rutin terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Adapun rumus dari analisis belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah:

$$\text{Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relative. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran (Abdul Halim : 2004).

a. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negative

b. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah . Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgent dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Rincian Yang Diperlukan

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Struktur anggaran dan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Data-data untuk perhitungan analisis belanja yang berasal dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2010-2013
4. Data lainnya yang relevan dalam penulisan ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bagian akuntansi biro keuangan Kantor Gubernur Sumatera Utara di JL. P.Diponegoro No. 30 Medan.

Adapun waktu penelitian bagi penulis melakukan penelitian ini dilakukan pada 30 Oktober 2014 sampai dengan 28 Febuari 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Teknik Dokumentasi Mengumpulkan data-data yang

ada dalam pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti sejarah pemerintahan, kegiatan operasional pemerintahan, visi, misi, struktur organisasi pemerintahan.

A. Definisi Operasional Variabel

Adanya definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu faktor berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau lebih faktor lain dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini.

Variabel penelitian ini adalah : Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam menganalisis pendapatan dapat digunakan beberapa Rasio keuangan daerah yaitu :

A. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

B. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

C. Analisis Rasio Keuangan

1). Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	>25 – 50
Sedang	>50 – 75
Tinggi	>75 – 100

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 21)

2). Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektif

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif

90% - 99 %	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 170)

Sedangkan rumus ratio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5% - 10%	Efisien
11% - 20%	Cukup Efisien
21% - 30%	Kurang Efisien
30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2011 : 171)

2. Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

1). Analisis Belanja Rutin

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Langsung terhadap

$$\text{Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Setelah melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penulis memperoleh data yang diperlukan untuk perhitungan analisis pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data-data tersebut telah dicantumkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada bab sebelumnya. Berdasarkan data-data keuangan yang telah diperoleh tersebut, maka perhitungan analisis pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih		Rata-rata %
			Rp	%	
2010	3.992.000.107.646	3.885.636.140.511	106.363.967.135	97,34	92,49%
2011	4.950.858.730.074	4.958.481.901.866	(7.623.171.792)	100,15	
2012	7.889.040.516.493	7.200.498.304.572	688.542.211.921	91,27	
2013	9.111.133.465.652	7.397.986.773.339	1.713.146.692.313	81,20	

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.2 : Komponen Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Komponen	Selisih (%)				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Pendapatan Asli Daerah	100,55	103,04	92,65	74,04	92,57%
Pendapatan Transfer	94,55	94,74	91,27	95,77	94,08%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	63,11	22,06	27,29	28,82	35,32%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.3 : Pertumbuhan Pendapatan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Tahun	PAD	Pertumbuhan	Pendapatan	Pertumbuhan
2010	2.554.780.317.361	26,7%	3.885.636.140.511	20,9%
2011	3.578.462.081.779	40%	4.958.481.901.866	27,6%
2012	4.050.763.903.338	13,2%	7.200.498.304.572	45%
2013	4.091.285.888.816	1%	7.397.986.773.339	2,7%

Rata-rata	20,2%	24%
------------------	-------	-----

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.4 : Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Tahun	PAD	Pendapatan	Rasio Kemandirian
2010	2.554.780.317.361	3.885.636.140.511	65,7%
2011	3.578.462.081.779	4.958.481.901.866	72,2%
2012	4.050.763.903.338	7.200.498.304.572	56,2%
2013	4.091.285.888.816	7.397.986.773.339	55,3%
Rata-rata			62,35%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.5 : Efektivitas Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas
	Anggaran	Realisasi	
2010	2.204.109.225.000	2.271.474.933.653	103,06%
2011	3.097.600.000.000	3.141.123.907.437	101,41%
2012	3.835.407.768.128	3.636.072.872.638	94,80%
2013	4.519.706.265.923	3.685.437.787.973	81,54%
Rata-rata			95,20%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.6 : Efisiensi Pajak Daerah Pada Pemerintah Sumatera Utara

Tahun 2010-2013

Tahun	Biaya Pemungutan		Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efisiensi
	Anggaran	Realisasi		
2010	2.204.109.225.000	2.271.474.933.653	35.813.384.809	1,88%
2011	3.097.600.000.000	3.141.123.907.437	31.297.593.623	1,39%
2012	3.835.407.768.128	3.636.072.872.638	33.487.109.273	5,95%
2013	4.519.706.265.923	3.685.437.787.973	49.364.915.335	16,90%
Rata-rata				14,03%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.7 : Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Rasio	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	

Rasio Belanja Rutin terhadap Total Belanja (Total Belanja Rutin/Total Belanja)x 100%	76,5%	72,1%	88,6%	88,7%	81,4%
Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja (Total Belanja Pembangunan/Total Belanja)x100%	23,4%	27,9%	11,3%	11,2%	18,4%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

Tabel IV.8 : Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Pemerintah Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Rasio	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Tidak Langsung/Total Belanja Daerah)x100%	77,02%	79,55%	48,79%	43,80%	62,29%
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Langsung/Total Belanja Daerah)x100%	69,66%	69,81%	75,07%	71,23%	71,44%

Sumber : Data diolah Tahun 2015

A. Pembahasan

Dari hasil perhitungan tersebut, maka diberikan uraian yang tertuang dalam pembahasan hasil Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Tahun 2010-2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisis varians (selisih) data kinerja anggaran pendapatan dari tahun 2010-2013 dapat diketahui gambaran analisis kinerja pendapatan dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan baik. Meskipun belum terlampaui target anggarannya. Hal ini menunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2010-2013 yang rata-rata mencapai 92,49%. Pada tahun 2010 selisihnya mencapai 97,34% dimana rata-rata selisih anggaran dan realisasi mencapai 92,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan redistribusi daerah hanya mencapai 68,74% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 68,57%. Namun pada tahun 2011 mencapai 100,15% dimana rata-rata selisih anggaran dan realisasi mencapai 92,49%. Hal ini disebabkan bahwa semua pendapatan melebihi target yang dianggarkan, baik dilihat dari pendapatan redistribusi

daerah mencapai 147,66% dan lain-lain PAD yang sah mencapai 164,52%. Selanjutnya pada tahun 2012 selisihnya mencapai 91,27% dimana rata-rata selisih anggaran dan realisasi mencapai 92,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan restribusi daerah hanya mencapai 85,49% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 66,07%. Dan pada tahun 2013 mencapai 81,20% dimana rata-rata anggaran dan realisasi belanja mencapai 92,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 81,54% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 15,12%.

2. Adapun sisi komponen dari pada Pendapatan daerah itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dimana pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri rata-ratanya mencapai 92,57%. Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mencapai 100,55% dimana rata-ratanya mencapai 92,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah melebihi dari target mencapai 103,06%. Namun pada tahun 2011 mencapai 103,04% dimana rata-ratanya mencapai 92,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan restribusi daerah yang melebihi target mencapai 147,86%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 92,65% dimana rata-ratanya mencapai 92,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan restribusi daerah yang mencapai 85,49%. Dan tahun 2013 mencapai 74,04% dimana rata-ratanya mencapai 92,57%. Hal ini disebabkan oleh lain-lain PAD yang sah 15,12% kurang dari target.

Pada Pendapatan Transfer rata-ratanya mencapai 94,08%. Dimana pada tahun 2010 mencapai 94,55% dimana rata-ratanya mencapai 94,08%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam hanya mencapai 11,83%. Namun tahun 2011 mencapai 94,74% dimana rata-ratanya mencapai 94,08%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam hanya mencapai 15,71%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 91,27% dimana rata-ratanya mencapai 94,08%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam mencapai 42,87%. Dan tahun 2013 mencapai 95,77% dimana rata-ratanya mencapai 94,08%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam mencapai 76,57%.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-rata mencapai 35,32%. Pada tahun 2010 mencapai 63,11% dimana rata-ratanya mencapai 35,32%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan hibah mencapai 63,11%. Namun tahun 2011 mencapai 22,06% dimana rata-ratanya mencapai 35,32%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan hibah hanya mencapai 22,06%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 27,29% dimana rata-rata mencapai 35,32%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan hibah hanya mencapai 27,29%. Dan tahun 2013 mencapai 28,82% dimana rata-ratanya mencapai 35,32%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan hibah yang hanya mencapai 28,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam komponen Pendapatan daerahnya pada tahun 2010-2013 dapat dikatakan baik.

3. Pertumbuhan Pendapatan dan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013 dikatakan cukup baik. Dari rata-rata Pertumbuhan PAD yang mencapai 20,2%. Dimana pada tahun 2010 mencapai 26,7%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah yang mencapai 100,55%. Namun pada tahun 2011 mencapai 40% dimana rata-ratanya

mencapai 20,2%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah mencapai 103,04%. Selanjutnya tahun 2013 mencapai 13,2% dimana rata-ratanya mencapai 20,2%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerahnya mencapai 92,65%. Dan pada tahun 2013 mencapai 1% dimana rata-ratanya mencapai 20,2%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah yang hanya mencapai 74,04%. Pertumbuhan pendapatan rata-ratanya mencapai 24%. Dimana pada tahun 2010 mencapai 20,9% dimana rata-ratanya mencapai 24%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer hanya mencapai 94,53%. Namun pada tahun 2011 mencapai 27,6% dimana rata-ratanya mencapai 24%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer yang hanya mencapai 94,05%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 45% dimana rata-ratanya mencapai 24%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer yang hanya mencapai 88,75%. Dan pada tahun 2013 mencapai 2,7% dimana rata-ratanya mencapai 24%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer yang hanya menghasilkan 95,21%.

4. Analisis Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bahwa kemandirian Keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kemampuan sedang dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio keuangan kemandirian yaitu $62,35\% < 100\%$. Pada tahun 2010 mencapai 65,7% dimana rata-ratanya mencapai 63,35%. Hal ini disebabkan oleh total pendapatan yang mencapai 97,34%. Namun pada tahun 2011 mencapai 72,2% dimana rata-ratanya mencapai 62,35%. Hal ini disebabkan oleh total pendapatan mencapai 100,15%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 56,2% dimana rata-ratanya mencapai 62,35%. Hal ini disebabkan oleh total pendapatan yang mencapai 91,27%. Dan pada tahun 2013 mencapai 55,3% dimana rata-ratanya mencapai 62,35%. Hal ini disebabkan oleh total pendapatan yang mencapai 81,20%.
5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah bahwa efektivitas pajak daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013 cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerahnya yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu $95,20\% < 100\%$ dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2010 mencapai 103,06% dimana rata-ratanya mencapai 95,20%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mencapai 117,65%. Namun pada tahun 2011 mencapai 101,41% dimana rata-ratanya mencapai 95,20%. Hal ini disebabkan oleh bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 110,66%. Selanjutnya pada tahun 2012 mencapai 94,80% dimana rata-ratanya mencapai 95,20%. Hal ini disebabkan oleh pajak air permukaan (APU) mencapai 56,34%. Dan pada tahun 2013 mencapai 81,54% dimana rata-ratanya mencapai 95,20%. Hal ini disebabkan oleh pajak bahan bakar bermotor mencapai 70,93%. Sedangkan rasio efisiensi Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013 cukup efisien dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efisiensi pajak daerah yaitu $14,03\% < 5\%$ dikatakan cukup efisien. Pada tahun 2010 mencapai 1,88% dimana rata-ratanya mencapai 14,03%. Hal ini disebabkan oleh bea balik nama kendaraan diatas air mencapai 36,66%. Namun tahun 2011 mencapai 1,39% dimana rata-ratanya mencapai

- 14,04%. Hal ini disebabkan oleh bea balik nama kendaraan diatas air mencapai 0%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 5,95% dimana rata-ratanya mencapai 14,03%. Hal ini disebabkan oleh pajak air permukaan mencapai 46,16%. Dan pada tahun 2013 mencapai 16,90% dimana rata-ratanya mencapai 14,03%. Hal ini disebabkan oleh pajak air permukaan mencapai 56,34%.
6. Pada Belanja Rutin rata-ratanya mencapai 81,4%. Pada tahun 2010 mencapai 76,5% dimana rata-ratanya mencapai 81,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 97%. Namun tahun 2011 mencapai 72,1% dimana rata-ratanya mencapai 81,4%. Hal ini disebabkan oleh bantuan keuangan mencapai 97,19%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 88,6% dimana rata-ratanya mencapai 81,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai 85,22%. Dan pada tahun 2013 mencapai 88,7% dimana rata-ratanya mencapai 81,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja barang dan jasa mencapai 90,17%. Belanja Pembangunan rata-ratanya mencapai 18,4%. Pada tahun 2010 mencapai 23,4% dimana rata-ratanya mencapai 18,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan dan mesin mencapai 87,85%. Namun pada tahun 2011 mencapai 72,1% dimana rata-ratanya mencapai 18,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan dan mesin mencapai 90,51%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 11,31% dimana rata-ratanya mencapai 18,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja tanah 97,34%. Dan pada tahun 2013 mencapai 11,2% dimana rata-ratanya mencapai 18,4%. Hal ini disebabkan oleh belanja asset tetap lainnya mencapai 96,34%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013 cukup baik.
 7. Belanja Langsung rata-rata rasionya mencapai 62,29%. Pada tahun 2010 mencapai 77,02% dimana rata-ratanya mencapai 62,29%. Hal ini disebabkan oleh belanja operasi 90,47%. Namun pada tahun 2011 mencapai 79,55% dimana rata-ratanya mencapai 62,29%. Hal ini disebabkan oleh belanja operasi mencapai 88,75%. Selanjutnya pada tahun 2012 mencapai 48,79% dimana rata-ratanya mencapai 62,29%. Hal ini disebabkan oleh belanja operasi mencapai 93,79%. Dan pada tahun 2013 mencapai 43,80% dimana rata-ratanya mencapai 62,29%. Hal ini disebabkan oleh belanja operasi yang mencapai 78,18%.
 8. Belanja Tidak langsung rata-rata rasionya mencapai 71,44%. Pada tahun 2010 mencapai 69,66% dimana rata-ratanye mencapai 71,44%. Hal ini disebabkan oleh belanja modal mencapai 80,50%. Namun pada tahun 2011 mencapai 69,81% dimana rata-ratanya mencapai 71,44%. Hal ini disebabkan oleh belanja modal mencapai 85,41%. Selanjutnya tahun 2012 mencapai 75,07% dimana rata-ratanya mencapai 71,44%. Hal ini disebabkan oleh belanja modal mencapai 97,34%. Dan pada tahun 2013 mencapai 71,23% dimana rata-ratanya mencapai 71,44%. Hal ini disebabkan oleh belanja modal yang mencapai 89,56%. Penyebabnya rasio belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja langsung. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam mengukur kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan

cukup baik dalam merealisasikan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dalam batas kemampuan penulis. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan baik, meskipun belum terlampaui target dalam anggarannya.
2. Dari sisi Komponen Pendapatan Daerah, dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan baik.
3. Pertumbuhan Pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yang mana kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan cukup baik.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masuk dalam kemampuan sedang dan mempunyai cenderung menurun, kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera dikatakan cukup baik.
5. Rasio Efektif dan Efisiensi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kinerja yang baik bila dilihat dalam rasio efektifnya dalam pajak daerah. Sedangkan dalam Rasio efisiensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan cukup baik.
6. Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kinerjanya dikatakan cukup baik.
7. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kinerjanya dikatakan cukup baik.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memperhatikan Pendapatan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerahnya, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dalam peningkatan pendapatan. Perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik.
2. Sebaiknya dalam Komponen Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan penggunaan dana dalam mengalokasikan pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, POLRI dan instansi penghasil.
3. Sebaiknya Pertumbuhan Pendapatan harus memperhatikan tingkat pendapatan asli daerahnya dalam merealisasikan pendapatan ke daerah-daerah yang dialokasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar terhindar dari penyimpangan dalam pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Sebaiknya Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumateera Utara harus memperhatikan bantuan kepada Pemerintah Pusat/kota agar tidak terjadi pemborosan dana dalam pengurangan Pendapatan Asli Daerah.
5. Sebaiknya dalam efektivitas dan Efisiensi Pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus meningkatkan pelaksanaan secara optimalisasi dalam

- pemungutan pajak dan redistribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat menguransi urusan wajib dan urusan pilihan dengan memilah milih kebutuhan yang memang menjadi rutin dan dibutuhkan dalam pemerintah agar tidak terjadinya pemborosan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 7. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat menghemat Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan kebutuhan di dalam kegiatan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul , Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Addina, Marizka.2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota* (Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Dedi, Nordiawan. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Eka, Rosalina. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat. (Thesis S2). Universitas Gadjah Mada.
- Erlina, SriMulyadi. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press, Medan.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mohammad,Adhim. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitanya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun*. Universitas. (Thesis S2). Unversitas Negeri Jambi
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara*. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN.
- Republik Indonesia, *Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.



_____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

_____, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan Daerah*.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2007*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Sugiyono, 2006. *Statistik untuk Penelitian*. Cetakan Sembilan, CV Alfabeta, Bandung.

Yuwono, S, I.T. Agus, dan Hariyadi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang.



Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis
Vol. 16 No. 1, Maret 2016
ISSN : 1693-7597